LAMPIRAN XXXII
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /K/411.013/2023
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

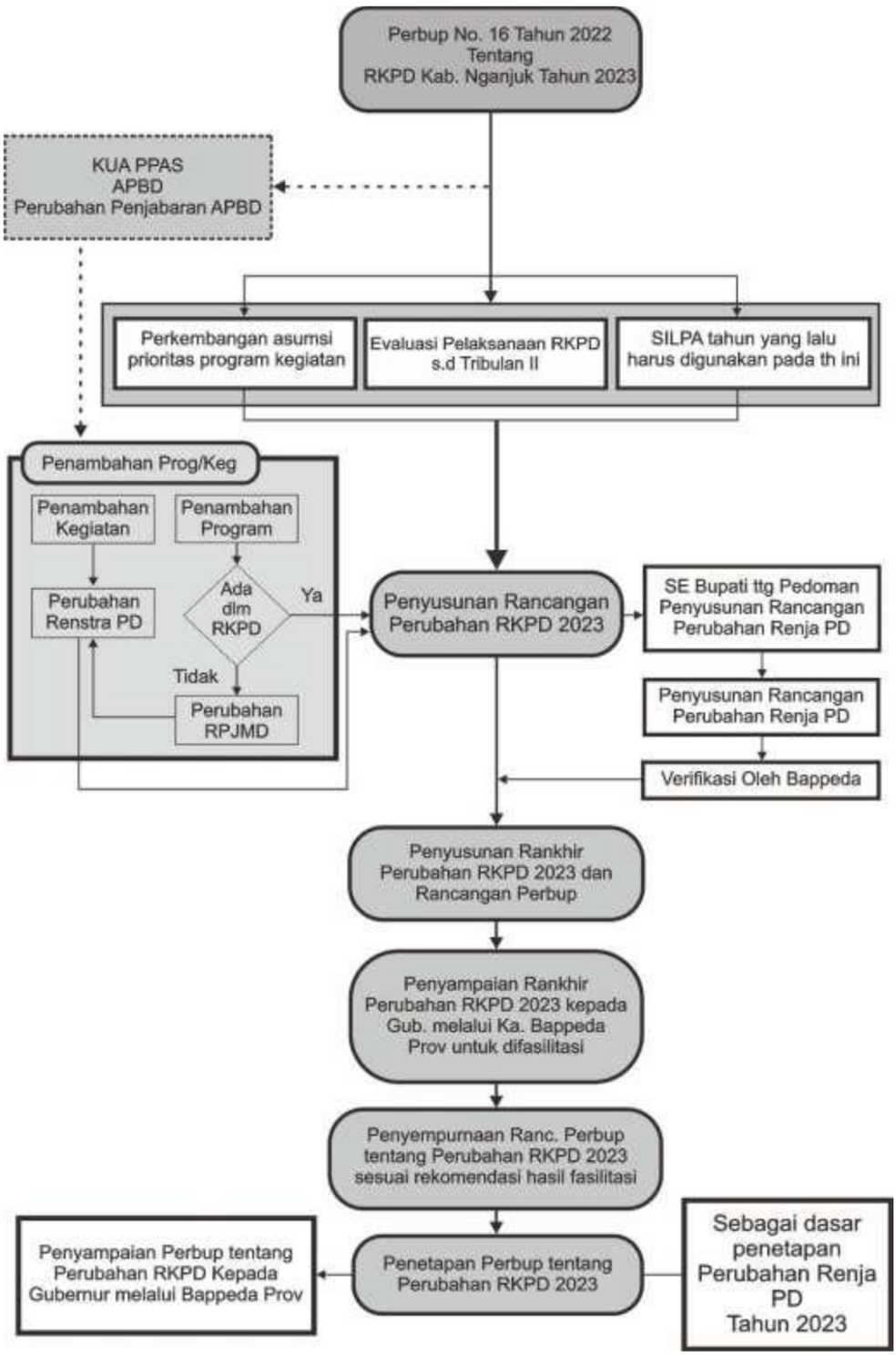
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau

c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada

akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -

Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
24. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2023;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Subkegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III			IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11			12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7	**0**																								
		7,01	**KECAMATAN**				**KECAMATAN**	Rp 3.103.558.790,00	**KECAMATAN**	Rp 3.523.622.255,00		325.515.341		1.062.718.475		0			0		1.062.718.475		30,2					
1	Meningkatnya kualitas publik kepada masyarakat	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayaan publik Pemerintah	Pelayanan Administrasi Perkantoran				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.085.338.230	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	223.571.837	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	952.712.075	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	952.712.075	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30,9	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		

			Daerah																							
	7.01.01.0.00.0.00.08.00	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**				**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	6.484.050	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	1.980.000	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	0	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	0		**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	0	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	1.980.000	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	30,5	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		KEC.Sukomoro
	01.2.01.06	Penyusunan dokumen Perencanaan Pengganggar Perangkat Daerah				Penyusunan dokumen Perencanaan Penggang garan Perangkat Daerah		Penyusunan dokumen Perencanaan Penggang garan Perangkat Daerah	1.508.525	Penyusunan dokumen Perencanaan Penggang garan Perangkat Daerah	-	Penyusunan dokumen Perencanaan Penggang garan Perangkat Daerah	0	Penyusunan dokumen Perencanaan Penggang garan Perangkat Daerah	0		Penyusunan dokumen Perencanaan Penggang garan Perangkat Daerah	0	Penyusunan dokumen Perencanaan Penggang garan Perangkat Daerah	-	Penyusunan dokumen Perencanaan Penggang garan Perangkat Daerah	0,0	Penyusunan dokumen Perencanaan Penggang garan Perangkat Daerah	0	Penyusunan dokumen Perencanaan Penggang garan Perangkat Daerah	0%	
	01.2.02.01	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD				Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.980.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.980.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	0		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	0	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.980.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	100,0	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD		
	01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD	2.995.125	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD	0	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD	0	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD	0		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD	0	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD	0	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD	0,0	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD		

		01.2.02.07	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.777.815.950	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	187.563.297	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	888.805.106	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	0		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	0	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	888.805.106	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	32,0	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
		01.2.06.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN				Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN		Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	2.769.778.000	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	187.563.297	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	887.797.106	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	0		Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	0	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	887.797.106	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	32,1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN		Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN		
		01.2.06.04	Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.008.000	Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.008.000	Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0		Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0	Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.008.000	Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100,0	Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		
		01.2.06.05	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	-	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	0	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	0		Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	0	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	-	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	0,0	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		
		01.2.06.06	Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD				Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD		Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1.000.000	Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD	-	Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD	0	Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD	0		Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD	0	Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD	0	Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD	0,0	Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD		Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD		
		01.2.06.08	Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2.029.500	Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-		Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0,0	Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		

		01.2.06.09	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan				Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1.014.000	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	-	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	0	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	0		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	0	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	-	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	0,0	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		
		01.01.2.07	***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD				***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD		***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	1.986.450	***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	0	***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	0	***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	0		***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	0	***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	0	***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	0,0	***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD		***K***oordinas dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD		
		01.2.07.06	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	12.453.820	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	0	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	0	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	0		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	0	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	0	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	0,0	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
		01.01.2.08	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	9.481.320	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0,0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		
		01.2.08.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2.972.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0,0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		
		01.2.08.02	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	129.822.858	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	9.764.899	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	18.992.449	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	0,00		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	0	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	18.992.449	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	14,6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		

	01.2.09.02	Penyediaan komponen instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor				Penyediaan kompone n instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor		Penyediaan kompone n instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor	4.256.268	Penyediaan kompone n instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor	88.000	Penyediaan kompone n instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor	98.000	Penyediaan kompone n instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor	0		Penyediaan kompone n instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor	0	Penyediaan kompone n instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor	98.000	Penyediaan kompone n instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor	2,3	Penyediaan kompone n instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor		Penyediaan kompone n instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor		
	01.2.09.06	Penyediaan bahan logistik kantor				Penyediaan bahan logistik kantor		Penyediaan bahan logistik kantor	33739400	Penyediaan bahan logistik kantor	3.041.899	Penyediaan bahan logistik kantor	5.429.199	Penyediaan bahan logistik kantor	0		Penyediaan bahan logistik kantor	0	Penyediaan bahan logistik kantor	5.429.199	Penyediaan bahan logistik kantor	16,1	Penyediaan bahan logistik kantor		Penyediaan bahan logistik kantor		
	01.2.09.09	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan				Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	8.250.000	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	836.000	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	1.200.250	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	0		Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	0	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	1.200.250	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	14,5	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		
	02.0.00.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	340.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	810.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	810.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	810.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	810.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22,5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		
	01.02.2,01	Fasilitasi kunjungan tamu				Fasilitasi kunjungan tamu		Fasilitasi kunjungan tamu	42.432.190	Fasilitasi kunjungan tamu	4.875.000	Fasilitasi kunjungan tamu	9.810.000	Fasilitasi kunjungan tamu	-		Fasilitasi kunjungan tamu	-	Fasilitasi kunjungan tamu	9.810.000	Fasilitasi kunjungan tamu	23,1	Fasilitasi kunjungan tamu		Fasilitasi kunjungan tamu		
	02.01.01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	37.545.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	826.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.645.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.645.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4,4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	16.575.852	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0,0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
	01.03.2.01	Pengadan peralatan danmesin lainnya				Pengadan peralatan danmesin lainnya		Pengadan peralatan danmesin lainnya	16.575.852	Pengadan peralatan danmesin lainnya	0	Pengadan peralatan danmesin lainnya	0	Pengadan peralatan danmesin lainnya	0		Pengadan peralatan danmesin lainnya	0	Pengadan peralatan danmesin lainnya	0	Pengadan peralatan danmesin lainnya	0,0	Pengadan peralatan danmesin lainnya		Pengadan peralatan danmesin lainnya		
	03.201.02	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritanahan Daerah**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	41.272.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	6.490.741	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	11.379.450	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	0		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	0	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	11.379.450	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	27,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
	03.201.02	Penyediaan Jasa surat menyurat				Penyediaan Jasa surat menyurat		Penyediaan Jasa surat menyurat	2.350.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	400.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	0	Penyediaan Jasa surat menyurat	0		Penyediaan Jasa surat menyurat	0	Penyediaan Jasa surat menyurat	400.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	17,0	Penyediaan Jasa surat menyurat		Penyediaan Jasa surat menyurat		
		Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik				Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	38.922.000	Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	6.090.741	Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	10.972.450	Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	0		Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	0	Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	10.972.450	Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	28,2	Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		

		04.2.01.00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100.913.700	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17.773.100	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	31.555.070	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	0		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	0	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	31.555.070	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31,3**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
		01.04.2.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	38.355.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	8.377.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	12.467.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	12.467.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	**32,5**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan		
		04.2.01.01	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	6.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	500.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	1.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	0		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	0	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	1.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	**28,1**	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya				Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya		Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya	56.158.400	Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya	8.896.100	Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya	17.288.070	Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya	0		Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya	17.288.070	Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya	**30,8**	Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya		Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya		KEC.Sukomoro

		01.05.2.01	**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	109.600.025	**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	10.491.150	**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	0	**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	0		**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	0	**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	10.491.150	**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	9,6	**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
		05.2.01.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	109.600.025	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	10.491.150	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	0	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	0		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	0	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	10.491.150	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	9,6	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	0	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	0 %	KEC.Sukomoro
		06.0.00.00	Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait				Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait		Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	109.600.025	Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	10.491.150	Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	0	Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	0		Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	0	Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	10.491.150	Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	9,6	Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait		Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait		
		01.06.2.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	122.460.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	18.479.800	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	0		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	18.479.800	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	15,1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		

	06.2.01.01.02	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	122.460.000	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	18.479.800	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	0	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	0		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	0	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	18.479.800	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	15,1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
	06.2.01.13	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.650.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.479.800	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.479.800	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	78,1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	98.810.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	0		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	0,0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan		KEC.Sukomoro
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	74.339.500	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	0	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	0	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	0		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	0	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	0	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	0,0	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		KEC.Sukomoro

			Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	74.339.500	**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	0	**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	0	**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	0		**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	0	**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	0	**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	0,0	**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan				Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	27.638.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0,0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		
			Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	46.701.500	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0		Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,0	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	75.585.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	0		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	0,0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.585.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		

			Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI				Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	75.585.000	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	0	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	0	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	0		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	0	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	0	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	0,0	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	56.299.500	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	4.970.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	0	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	0		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	0	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	4.970.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	8,8	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		

			Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	56.299.500	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	4.970.000	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	0	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	0		**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	0	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	4.970.000	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	8,8	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
			Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa				Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa		Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa	36.419.500	Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa	825.000	Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa	0	Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa	0		Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa	0	Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa	825.000	Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa	2,3	Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa		Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa		
			Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif				Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	19.880.000	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	4.145.000	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	0	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	0		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	0	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	4.145.000	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	20,9	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kurang memadainya bandwith internet mempengaruhi yang koneksi aplikasi virtual meeting (buffer) selama adaptasi kebiasaan baru pelaksanaan rapat/seminar secara daring pada saat pandemi COVID-19.	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah bandwith internet dengan meningkatkan alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terjadinya Perubahan RKPD untuk kegiatan Publikasi.	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah Kegiatan Pembinaan dan Layanan Publikasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62%	Sedang

Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terjadinya Perubahan RKPDuntuk kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terjadinya Perubahan RKPDuntuk kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah Kegiatan Pembinaan dan Pencegahan Covid-19
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terjadinya Perubahan RKPDuntuk kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Rencana Anggaran Kas masuk pada Triwulan ke III dan IV	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

Tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana Strategis Kecamatan Berbek, dengan sasaran :

1. Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan
2. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Nilai 84,50 kategori Baik	Nilai 81,54 kategori Baik	65 %

Sasaran 2. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	65 %	65%
Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	65,71 %	65,71%

Keseluruhan anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) pada Kecamatan Berbek pada tahun 2023 sebesar **Rp. 4.285.880.672** telah terserap sebesar 24,4 % atau sejumlah **Rp. 1.046.182.140,-**

PENGUKURAN DAN MENGIDENTIFIKASI PENGGANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA (SAMPAI DENGAN TRIBULAN II Tahun 2023)

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN		Program ,Kegiatan, sub kegiatan	**Anggaran**			**Hambatan/ kendala /rekomendasi**
			Target	Realisasi %		Anggaran	Realisasi	%	
	Meningkatnya kualitas publik kepada masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85 %	30.2	**Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	4.285.880.672	1.046.182.140	30.2	**Dalam Proses Berjalan**
				30,9	***Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	1.500.000	0	30,9	
				0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthtisar realisasi kinerja SKPD	1.500.000	0	0	
			100%	32,0	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.778.962.160	897.791.634	32,0	**Proses Berjalan**
			100%	32,1	Gaji dan Tunjangan ASN(kecamatan Sukomoro)	2.699.294.160	891.861.634	32,1	
			100%	0,0	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Ferifikasi Keuangan SKPD	38.280.000	-	0,0	
			100%	0,0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun SKPD	1.522.000	-	0,0	
			100%	0,0	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan bulanan/tribulanan/semesteran SKPD	1.586.000	0	0,0	
			100%	0,0	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	29.496.000	0	0,0	Dalam Pengajuan Perubahan anggaran

			100%	0,0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	9.156.000	0	0,0	
			100%	**15,11**	***Administrasi Umum Perangkat Daearah***	162.375.072	18.992.449	**15,11**	
			100%	14,6	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.614.200	98.000	14,6	
			100%	2,3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.610.822	5.429.199	2,3	
			100%	16,1	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	4.748.000	1.200.250	16,1	
			100%	14,5	Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan	3.600.000	810.000	14,5	
			100%	22,5	Fasilitas kunjungan Tamu	4.500.000	9.810.000	22,5	
			100%	23,1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	30.990.000	1.645.000	23,1	
			100%	0,0	***Pengadaan barang milih daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah***	91.649.000	0	0,0	**Proses berjalan**
			100%	0,0	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	56.000.000	0	0,0	
	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan Kecamatan	tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan	100%	27,6	***Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah***	368.473.500	11.379.450	27,6	
			100%	28,2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	33.600.000	10.972.450	28,2	
		tingkat efektifitas pembinaan desa	100%		***Pemeliharaan Barang Milih daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah***	345.993.900	31.555.070		berjalan
			100%	**41,47**	penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	27.187.100	12.467.000	**41,47**	
			100%	93,91	Pemeliharaan Peralatan dan	12.500.000	1.800.000	93,91	

					Mesin lainnya				
			100%	20,51	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	122.852.000	17.288.070	20,51	
		koordinasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	18.849.350	10.491.150		**berjalan**
			100%	**34,17**	***Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan***	8.489.350	10.491.150	**34,17**	
			100%	34,17	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	8.489.350	10.491.150	34,17	
		tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan	100%		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	768.230.200	18.479.800		
			100%	0	***Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa***	31.908.700	18.479.800	0	
			100%	0	Peningkatan Masyarakat dalam forum musyawarah perecanaan pembangunan di desa	14.471.200	18.479.800	0	
		tingkat efektifitas pembinaan desa	100%		Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	17.437.500	0		
			100%	31,3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	74.339.500	0	31,3	**Kegiatan Berjalan**
			100%	32,5	***Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	27.771.700	0	32,5	
			100%	28,1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	27.771.700	0	28,1	

					Indonesia,Tentara Nasional Indonesia vertikal di wilayah kecamatan				
			100%	9,6	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	12.982.090	0	9,6	Kegiatan berjalan
			100%	9,6	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.982.090	0	9,6	
			100%	15,1	**Program pembinaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	422.788.300	4.970.000	15,1	terlaksana
			100%	15,1	***Fasilitasi rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	422.788.300	4.970.000	15,1	
			100%	78,1	Fasilitasi Administrsi tata pemrintahan Desa	170.851.550	825.000	78,1	
			100%	0,0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.550.000	4.145.000	0,0	

PENGUKURAN ATAS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA S.D TRIBULAN II 2023

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	PENGUKURAN ATAS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA S.D TRIBULAN II
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik Pemerintah Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan IKM	Sekretariat	81,54%
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintah kecamatan	Nilai sakip kecamatan	$\frac{jumlah\ koordinasi\ yang\ ditindaklanjuti}{jumlah\ seluruh\ koordinasi} \times 100\%$	Laporan Hasil koordinasi sesuai indikator dalam penilaian sinergitas Kecamatan	Semua Seksi	65,80 Kategori B (Baik)

3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	$\frac{Jumlah Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang}{Jumlah seluruh Desa}$ Desa yang yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban (LPPD, LKPPD, IPPD, dan Pertanggungjawaban APB Desa) yang berkualitas.	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi	Seksi tapem dan PMD	65%

PENGGUKURAN INDIKATOR KINERJA KUNCI SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Publik Pemerintah aerah	84,50	81,54%	81,54%
2	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan	Nilai Sakip	86	65,80 baik	65,80 Kategori B (Baik)

	Kecamatan				
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Presentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100%	65%	65%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKOMORO

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGET RENSTRA OPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			89,68	89,68	90			89,68	89,68	90			89,68	89,68	90
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**90%**	**90%**	**90%**			**90%**	**90%**	**90%**			**90%**	**90%**	**90%**
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**90%**	**90%**	**90%**			**90%**	**90%**	**90%**			**90%**	**90%**	**90%**
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**90%**	**90%**	**90%**			**90%**	**90%**	**90%**			**90%**	**90%**	**90%**
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			12 laporan	12 laporan	12 laporan			12 laporan	12 laporan	12 laporan			12 laporan	12 laporan	12 laporan
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			12 desa	12 desa	12 desa			12 desa	12 desa	12 desa			12 desa	12 desa	12 desa

IDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN SUKOMORO

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun-3 2021	Tahun -4 2022	Tahun -5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan	Ilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adlah Penilaian uum mengkomfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek kesejakteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek trantib 8. Aspek Pemerintahan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun -2 2020	Tahun -3 2021	Tahun -4 2022	Tahun -5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	88,28	82,33	83,78	84	84,50	85	85
2	Nilai SAKIP Kecamatan	$\frac{\sum ASN\ DENGAN\ NILAI\ SKP\ BAIK}{SELURUH\ ASN} x100\ \%$	82,62%	83,64 %	84,00 %	85%	86%	87%	87%
3	Presentase Desa yang Menerapkan tata kelola yang baik	$\frac{Pembinaan\ yang\ di\ tindak\ lanjuti}{\sum Seluruh\ Pembinaan} x100\ \%$	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%

2.3. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2023, yaitu **"Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan SDM yang berkualitas, potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan strategi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata kelola sumber daya air khususnya penanganan banjir perkotaan, lingkungan hidup dan peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.
6. Meningkatkan stabilisasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;

5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan (**Urusan Kewilayahan Kecamatan Sukomoro).**

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah "*Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraann Tugas-tugas Kecamatan*", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "*Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat,Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan,Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang Baik*", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraann Tugas-tugas Kecamatan	85 % (Baik)

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Publik Pemerintah Daerah	85
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Baik
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (KECAMATAN SUKOMORO)

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	keterangan		Catatan Penting
		Uraian (Output)	Target		Bertambah	berkurang	
	Urusan Kewilayahan						
	Kecamatan Sukomoro			***4.285.880.672***			
	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah		***4.285.880.672***			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			***1.500.000***			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.500.000			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.692.322.160			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2.689.214.160			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	2,029,500			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	1,986,450			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			***12,453,820***			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas dan atributnya	26 paket	9,481,320	7.701.100		Adanya Penambahan Pakaian Dinas
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya sosialisasi perundang undangan	2 kegiatan	2,972,500			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			129.822.858			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun	4,256,268			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 jenis	33,739,400	2,500.000		Penambahan ATK
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	8,250.000			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,600,000			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 kegiatan	42,432,190	8.415.000		Penambahan Makanan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah ASN yang melaksanankan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	37,545,000	29.383.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			***16.575,852***			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 jenis	16,575,000			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			***41,272,000***			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	2,350,000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun	38,922,000			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			***100,913,700***			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	1 tahun	38,355,300	10,000.000		Penambahan Sosialisasai kegiatan

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6,400,000			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Kegiatan	56.158,400			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			***109.600.025***			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			***109.600.025***			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun	12 Laporan	***109.600.025***		55,475.000	Penambahan Sosialisasai kegiatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			***122.460.000***			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			***122.460.000***			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurah	1 kegiatan	23,650,000			
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 kegiatan	98.810.000		825.000	Penambahan Sosialisasai kegiatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**74.339.500**			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**74.339.500**			

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian dan TNI	12 laporan	27,638,000			
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 kegiatan	46,701.500		1,650.000	Penambahan Sosialisasai kegiatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**75.585.000**			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			**75.585.000**			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	**75.585.000**			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**56,299.500**			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**56,299.500**			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 desa	36.419.500			
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19 desa	19,880,000			
JUMLAH					57.950.000	57.950.000	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU

PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUKOMORO

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM *(OUTCOME)*/ KEGIATAN *(OUTPUT)*/ SUB KEGIATAN *(OUTPUT)*		TARGET				PAGU			PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2023	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SATUAN	RKPD 2023	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Unsur Kewilayahan												
	KECAMATAN	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah**	**91**	**91**	**91**	Nilai	**4.285.880.672**	**3.068.762.378**	**2.917.564.440**	**Kec. Sukomoro**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD**	**4**	**4**	**4**	Dokumen	**6,484,050**	**6,484,050**	**6,484,050**	**Kec. Sukomoro**

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Sukomoro)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Sukomoro)	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**1**	**1**	**1**	Dokumen	1,508,925	1,508,925	1,508,925	**Kec. Sukomoro**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Sukomoro)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Sukomoro)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Sukomoro)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Sukomoro)	**1**	**1**	**1**	Dokumen	1,980,000	1,980,000	1,980,000	**Kec. Sukomoro**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar OPD yang dilaksanakan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar OPD yang dilaksanakan	2	2	2	Dokumen	2,995,125	2,995,125	2,995,125	**Kec. Sukomoro**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**83**	**83**	**83**		**2,777,815,950**	**2,777,815,950**	**2,560,234,950**	**Kec. Sukomoro**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	%	2,769,778,000	2,769,778,000	2,552,197,000	**Kec. Sukomoro**
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45	45	45	Dokumen	1,008,000	1,008,000	1,008,000	**Kec. Sukomoro**

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26	26	26	Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	**Kec. Sukomoro**
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	2	2	2	Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	**Kec. Sukomoro**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	Dokumen	2,029,500	2,029,500	2,029,500	**Kec. Sukomoro**
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	5	5	Dokumen	1,014,000	1,014,000	1,014,000	**Kec. Sukomoro**

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	2	2	2	Dokumen	1,986,450	1,986,450	1,986,450	**Kec. Sukomoro**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28	28	28	Kegiatan	12,453,820	12,453,820	25,289,720	**Kec. Sukomoro**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas dan atributnya	tersedianya pakaian dinas dan atributnya	26	26	26	paket	9,481,320	9,481,320	22,317,220	**Kec. Sukomoro**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya sosialisasi perundang undangan	terlaksananya sosialisasi perundang undangan	2	2	2	Kegiatan	2,972,500	2,972,500	2,972,500	**Kec. Sukomoro**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD**	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD**	**15**	**15**	**15**		**129,822,858**	**129,822,858**	**156,644,168**	**Kec. Sukomoro**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1	1	1	Tahun	4,256,268	4,256,268	4,256,268	**Kec. Sukomoro**

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	5	5	5	Jenis	33,739,400	33,739,400	33,739,400	**Kec. Sukomoro**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1	1	1	Tahun	8,250,000	8,250,000	8,250,000	**Kec. Sukomoro**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	2	2	2	dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	**Kec. Sukomoro**
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	5	5	Kegiatan	42,432,190	42,432,190	42,432,190	**Kec. Sukomoro**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah ASN yang melaksanankan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah ASN yang melaksanankan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	1	Tahun	37,545,000	37,545,000	59,590,000	**Kec. Sukomoro**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	3	3	3	jenis	16,575,852	16,575,852	16,575,852	**Kec. Sukomoro**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	3	jenis	16,575,852	16,575,852	16,575,852	**Kec. Sukomoro**

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang SKPD**	**Jumlah jasa penunjang SKPD**	**2**	**2**	**2**	**Tahun**	**41,272,000**	**41,272,000**	**41,272,000**	**Kec. Sukomoro**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa paket / pengiriman surat menyurat	Jumlah jasa paket / pengiriman surat menyurat	1	1	3700	tahun	16.714.000	16.714.000	16.714.000	**Kec. Sukomoro**
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	1	1	1	Tahun	26.400.000	26.400.000	26.400.000	**Kec. Sukomoro**
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana barang milik Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana barang milik Daerah**	**14**	**14**	**14**	**tahun/unit**	**100,913,700**	**100,913,700**	**100,913,700**	**Kec. Sukomoro**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat	1	1	1	Tahun	38,355,300	38,355,300	48,505,300	**Kec. Sukomoro**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Mebel yang dipelihara	5	5	5	unit	6,400,000	6,400,000	6,400,000	**Kec. Sukomoro**

			Lainnya										
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	Jumlah gedung kantor yang terawat	8	8	8	kegiatan	56,158,400	56,158,400	56,158,400	**Kec. Sukomoro**
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	**109,600,025**	**109,600,025**	**52,548,500**	**Kec. Sukomoro**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan**	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	**109,600,025**	**109,600,025**	**52,548,500**	**Kec. Sukomoro**
		Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	109,600,025	109,600,025	52,548,500	**Kec. Sukomoro**

		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**2**	**2**	**2**	**Kegiatan**	**122,460,000**	**122,460,000**	**121,635,000**	**Kec. Sukomoro**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**2**	**2**	**2**	**Kegiatan**	**122,460,000**	**122,460,000**	**121,635,000**	**Kec. Sukomoro**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah kegaiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes	Jumlah kegaiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kegiatan	23,650,000	23,650,000	23,650,000	**Kec. Sukomoro**
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kegiatan	98,810,000	98,810,000	97,985,000	**Kec. Sukomoro**

		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**Prosentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	12 Kegiatan/laporan	12 Kegiatan/laporan	12 Kegiatan/laporan	**Kegiatan/laporan**	**27,638,000**	**27,638,000**	**27,638,000**	**Kec. Sukomoro**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	12 Kegiatan/laporan	12 Kegiatan/laporan	12 Kegiatan/laporan	**Kegiatan/laporan**	**27,638,000**	**27,638,000**	**27,638,000**	**Kec. Sukomoro**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian dan TNI	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian dan TNI	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	27,638,000	27,638,000	27,638,000	**Kec. Sukomoro**
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kegiatan	46,701,500	46,701,500	55,051,500	**Kec. Sukomoro**

		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Prosentase warga / lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan**	**Prosentase warga / lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan**	200 orang	200 orang	200 orang	jumlah	**75,585,000**	**75,585,000**	**95,785,000**	**Kec. Sukomoro**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	200 orang	200 orang	200 orang	jumlah	**75,585,000**	**75,585,000**	**95,785,000**	**Kec. Sukomoro**

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indnesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indnesia	Jumlah warga / lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah warga / lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	200 orang	200 orang	200 orang	jumlah	75,585,000	75,585,000	95,785,000	**Kec. Sukomoro**
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Prosentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**38**	**38**	**38**	Jumlah	**56,299,500**	**56,299,500**	**56,299,500**	**Kec. Sukomoro**

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**38**	**38**	**38**	Jumlah	**56,299,500**	**56,299,500**	**56,299,500**	**Kec. Sukomoro**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	19 desa	19 desa	19 desa	Jumlah	36,419,500	36,419,500	36,419,500	**Kec. Sukomoro**
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19 desa	19 desa	19 desa	Jumlah	19,880,000	19,880,000	19,880,000	**Kec. Sukomoro**
										3,507,046,403	**3,507,046,403**	**3,326,521,940**	

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

#TABEL PRINT OUT SIPD: MENU PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023

ABEL PRINT OUT SIPD: MENU PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3.423.634.755**					**3.400.550.000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3.175.338.230**					**3.175.050.000**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.484.050**					**10.000.000**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		88 %	1 Dokumen 12 bulan	5 dukumen	1.508.925	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	2.000.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		88 %	1 Dokumen 12 bulan	5 dukumen	1.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	2.000.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		88 %	1 Dokumen	5 dukumen	2.995.125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	3.000.000
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.867.815.950**					**2.871.778.000**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		88 %	26 orang/bula	n7 Kegiatan	2.859.778.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	2.859.778.000
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		88 %	100 dokumen	7 Kegiatan	1.008.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	2.000.000
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		88 %	20 Dokumen	7 Kegiatan	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	2.000.000
7	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		88 %	12 Dokumen	7 Kegiatan	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	2.000.000
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		88 %	1 Dokumen	7 Kegiatan	2.029.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	2.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		88 %	5 Dokumen	7 Kegiatan	1.014.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	2.000.000
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	aTnersedianaya Administrasi orKaenuangan Perangkat Daerah eran		88 %	16 Dokumen	7 Kegiatan	1.986.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	2.000.000
7	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**12.453.820**					**12.500.000**
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	tersedianya pakaian dinas dan atributnya	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		88 % 26 orang 26 paket	26 paket	2 Kegiatan	9.481.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	88 % 26 orang 26 paket	9.500.000
7	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	terlaksananya sosialisasi perundang undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		88 % 26 orang 26 paket	26 orang	2 Kegiatan	2.972.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	88 % 26 orang 26 paket	3.000.000
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**129.822.858**					**119.000.000**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi umumPerangkat Daerah		88 %	2 Paket	5 Kegiatan	4.256.268	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	4.000.000
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi umumPerangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	2 Paket	5 Kegiatan	33.739.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	36.000.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya administrasi umumPerangkat Daerah		88 %	1 Paket	5 Kegiatan	8.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	15.000.000
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	jumlah bahan bacaan dan peru ndang undangan yang tersedianya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya administrasi umumPerangkat Daerah		88 %	1 tahun 3 Dokumen	5 Kegiatan	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	4.000.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya administrasi umumPerangkat Daerah		88 %	12 Laporan	5 Kegiatan	42.432.190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	37.000.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	jumlah ASN yang melaksanankan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya administrasi umumPerangkat Daerah		88 %	1 tahun	5 Kegiatan	37.545.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	23.000.000

7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16.575.852**						**9.000.000**
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		88 %	3 Unit	3 unit	16.575.852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	9.000.000
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**41.272.000**						**41.272.000**
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		88 %	500 Laporan	500 Laporan	2.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	2.350.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		88 %	24 Laporan	500 Laporan	38.922.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	38.922.000
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**100.913.700**						**111.500.000**
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		88 %	5 Unit 1 tahun	2 Kegiatan	38.355.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	53.000.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		88 %	3 Unit	2 Kegiatan	6.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	6.500.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		88 %	2 Unit	2 Kegiatan	56.158.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Perangkat Daerah	88 %	52.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**82.626.525**						**54.000.000**
7	**01**	**02**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**82.626.525**						**54.000.000**
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Meningkatnya Tingkat efektifitas Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan,Pemberdaya a Masyarakat dan Desa serta Keamanan dan Ketertipan	jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun n	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12 Laporan 28 Laporan	1 tahun	12 Laporan	82.626.525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata Pemerintahan denga Perangkat Daerah da Instansi Vertikal Terk Meningkatnya Tingk efektifitas Koordinasi Umum Pemerintahan,Pemb e Masyarakat dan Desa Keamanan	n n n $_{ai}$1,$_{t}$2 Laporan $_{at}$28 Laporan Tugas rdayaan serta tipan	54.000.000

7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**48.232.500**						**64.000.000**
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**48.232.500**						**64.000.000**
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Prosentase Koordinasi Bidang Pemerintahan,Keamanan dan keteripan umum kesejakteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang di tindak lanjuti	jumlah usulan masyarakat dalam forum musyawarah kecamatan yang di fasilitasi Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		19 Dokumen 76 lembaga masyarakat 61 lembaga kemasyarakat	1 tahun 76 lembaga masayarakatan	76 lembaga	23.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swa di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di De Prosentase Koordina Bidang Pemerintahan,Keam a dan keteripan umum kesejakteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang di tindak lanjuti	sta g 19 Dokumen 76 lembaga masyarakat 61 lembaga sa kemasyarakatan si nan	22.000.000
7	01	03	2,01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Prosentase Koordinasi Bidang Pemerintahan,Keamanan dan keteripan umum kesejakteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang di tindak lanjuti	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		19 Dokumen 76 lembaga masyarakat 61 lembaga kemasyarakat	0 Dokumen an	76 lembaga	24.582.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swa di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di De Prosentase Koordina Bidang Pemerintahan,Keam a dan keteripan umum kesejakteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang di tindak lanjuti	sta g 19 Dokumen 76 lembaga masyarakat 61 lembaga sa kemasyarakatan si nan	42.000.000

7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**48.462.500**					**40.000.000**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**48.462.500**					**40.000.000**
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya Koordinasi kegiatan Pemerintahan di tingkaat Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3 Laporan 200 orang 24 Laporan	24 Laporan	2 Laporan	27.638.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya Koordinasi kegiatan Pemerintahan di tingkaat Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata	3 Laporan 200 orang 24 Laporan	20.000.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2023 dapat dicapai dengan optimal.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
    c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan
3. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI